

BAB II

BURUH MIGRAN CINA: IDENTITAS DIRI MENUJU MASA DEPAN

II. 1. Definisi dan Konsep Buruh di Cina

Ada beberapa pengertian tentang istilah buruh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah¹. Dalam pengertian ini buruh masih dibagi menjadi beberapa kelompok. Pembagian tersebut berdasarkan tempat di mana buruh bekerja dan jenis pekerjaannya (buruh tani, buruh tambang, buruh pabrik), periode atau lama bekerja (buruh musiman), upah yang dibayarkan (buruh harian), keterampilan atau keahlian yang dimiliki (buruh kasar, buruh terampil).

Pengertian selanjutnya, buruh adalah seorang pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus sebagai modal untuk bekerja. Pengertian ini lebih spesifik menilai buruh. Dengan kata lain, buruh tidak memiliki keahlian apa pun dan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bekerja, "...labourer (US -bor) n [c] person who does heavy unskilled work" (Oxford Learner's Pocket Dictionary, 1995).

Pengertian ketiga berdasarkan Kamus Modern Bahasa Cina (*Xiandai Hanyu Cidian* 现代汉语词典). Dalam kamus ini ada dua konsep mengenai buruh. Pertama, buruh adalah orang yang ikut serta dalam pembangunan jalan raya, tanggul, atau membantu para tentara (Cina) dalam pengangkutan atau transportasi dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang semuanya itu dilakukan atas himbauan atau seruan dari pemerintah (Cina). Konsep kedua menunjuk pada petani yang bekerja di kota.

“民工：1。在政府动员或号召下参加修筑公路、堤坝或帮助军队运输等工作的人，2。指到城市打工的农民。”(中国社会科学院语言研究所词典编辑室编，1998)。

¹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: 2002), hal. 180.

Jadi, secara umum buruh ialah seseorang yang diupah untuk bekerja dengan hanya mengandalkan kekuatan fisiknya karena tidak memiliki keahlian khusus. Meskipun terdapat kesamaan secara umum, tetapi jika dicermati lebih jauh, sebenarnya ada perbedaan mendasar tentang konsep buruh. Perbedaan konsep buruh ini terjadi karena perbedaan ideologi yang dimiliki tiap-tiap negara. Dalam dua definisi buruh pertama, buruh diartikan dengan dasar ideologi kanan (liberal-kapitalis), yaitu sebatas seorang pekerja yang bekerja. Akan tetapi dalam pengertian terakhir, yaitu dalam konsep negara Cina, buruh diartikan dengan dasar ideologi kiri (komunis) yaitu buruh tidak semata-mata seorang pekerja yang bekerja. Ia adalah kekuatan utama untuk membangun negara¹.

Buruh dengan konsep ideologi kiri didasarkan pada ajaran Marx-Lenin. Marxisme-Leninisme mengkritik kapitalisme sebagai suatu sistem yang berpengaruh luas karena hak milik pribadi. Menurut paham tersebut, hak milik pribadi menjadi penyebab pecahnya masyarakat ke dalam dua kelas. Kelas pertama yaitu kelas yang mempunyai hak milik pribadi seperti modal atau alat produksi. Mereka yang masuk dalam kelas ini disebut borjuis atau kapitalis. Kelas kedua ialah kelas yang hanya memiliki tenaga kerja. Mereka tidak mempunyai hak milik pribadi. Orang-orang yang dikategorikan ke dalam kelas ini disebut proletar atau buruh. Hubungan antara kelas pertama dan kedua bersifat dialektis², yaitu penindasan dan pemerasan kaum kapitalis terhadap kaum buruh demi kepentingan produksi.

Marxisme sangat menekankan kerjasama, solidaritas, dan kolektivitas. Pemerasan terhadap kaum buruh oleh kaum borjuis, pada akhirnya menyadarkan kaum buruh akan nasibnya. Solidaritas mereka pun makin kuat. Mereka berusaha

¹ Dalam Marxisme, buruh disebut sebagai kekuatan utama untuk melakukan revolusi. Kaum buruh dipilih oleh Marx karena buruh dianggap sebagai kaum yang paling dirugikan dalam kapitalisme. Tenaga mereka diperas dan upah yang didapat pun sedikit. Mereka tak berdaya untuk melawan kaum kapitalis (para pemilik modal). Perbedaan kaum buruh dengan kaum yang lain adalah kaum buruh tidak mudah menyerah dalam penderitaan. Mereka memiliki kesadaran kelas dan semangat juang yang tinggi. Secara kolektif menggalang kekuatan untuk revolusi. Revolusi tersebut bersifat politis untuk menggulingkan kekuasaan kaum kapitalis. Setelah revolusi berhasil, maka yang berkuasa adalah kaum buruh yang direpresentasikan dalam partai buruh. Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta, 2005), hal. 169.

² *Ibid.*, hal. 60-62.

membebaskan diri dari penderitaan dengan menghapus hak milik pribadi yang menjadi sumber penderitaan. Dalam pamflet Marx yang terkenal “Manifesto of the Communist Party” (1848), ia membuka wacananya dengan suatu pernyataan bahwa sejarah masyarakat yang berlangsung selama ini adalah sejarah perjuangan kelas (The history of all hitherto existing society is the history of class struggle)³. Melalui perjuangan kelas, Marx mengajarkan kaum buruh melawan individualisme dan menciptakan revolusi proletariat untuk menjatuhkan kaum borjuis dan menghantarkan kaum buruh pada kemenangan. Hasil dari revolusi tersebut ialah lahirnya diktator proletariat dan manusia komunis⁴.

Komunisme dari ajaran Marx-Lenin memang dijadikan dasar membangun negara Cina terutama ketika masa Mao Zedong. Akan tetapi ada sedikit perbedaan dalam aplikasinya. Pada masa perjuangan mendirikan negara Cina, Mao menjadikan buruh sebagai motor penggerak. Akan tetapi, menggerakkan buruh untuk mencapai revolusi di Cina seperti ajaran Marx-Lenin tidak semulus yang dibayangkan. Mao menyadari beberapa permasalahan tentang hal itu. Pertama, jumlah kaum buruh di Cina sedikit karena industrialisasi Cina pada masa itu masih terbatas pada kota-kota seperti Shanghai (上海). Kedua, kaum buruh cenderung hidup “aman dan nyaman”. Para buruh yang bekerja sebagai pengangkut barang di perkapalan atau yang bekerja dalam pembangunan rel kereta api di kota, pada umumnya hidup cukup dari upah yang mereka terima. Mereka sedikit menderita. Hal tersebut membuat Mao menyadari kekuatan lain yang bisa dijadikan motor penggerak revolusi. Mereka adalah para petani. Mereka yang paling sering menderita dengan perubahan yang terjadi di Cina sejak dulu, terutama pada masa berkuasanya para tuan tanah. Pada masa itu tenaga mereka diperah dan hidup mereka tidak tenang karena gangguan dari para pencuri, pemberontak, dan perampok. Penderitaan para petani yang lama dirasakan dan tak kunjung habis, menghasilkan kekuatan luar biasa untuk mendorong terjadinya revolusi.

³ M. Dawam Rahardjo, “Peranan Pekerja dalam Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Reformasi Ekonomi* Vol. 4, No.1, Januari-Desember 2003, hal. 54.

⁴ Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran...*, hal. 169.

Selain itu, keunggulan para petani adalah dari segi kuantitas. Karena sebagian besar penduduk Cina adalah petani dan hidup di pedesaan, jadi dari segi kuantitas mereka jauh lebih besar dari buruh. Sehingga, dengan menjadikan petani sebagai dasar kekuatan menggantikan buruh, pemerintah yang berkuasa saat itu yaitu Partai Nasionalis Cina bisa digulingkan. Bukan hanya itu, bahkan kaum kapitalis yang berada di Cina karena didukung oleh pemerintah saat itu bisa disingkirkan.

II. 2. Peran dan Perkembangan Buruh Cina Secara Umum

Keberadaan buruh di Cina mulai muncul sekitar tahun 1860-an. Ketika itu kota-kota baru di Cina mulai berkembang sebagai akibat dari pertumbuhan pabrik-pabrik asing⁵. Peranan mereka untuk Cina masih belum terlihat. Akan tetapi setelah meletusnya Perang Dunia ke-I (1914-1918) keberadaan dan peranan mereka, terutama yang bersifat politik, mulai tampak.

Peranan kelas proletar atau buruh baru muncul setelah Gerakan Empat Mei (*Wu Si Yundong* 五四运动) pada tahun 1919. Mereka turut bergerak bersama para intelektual dan rakyat Cina yang lain dalam gerakan tersebut. Keikutsertaan para buruh disebabkan oleh perasaan senasib di sektor industri akibat tekanan imperialisme asing, kapitalisme nasional, dan golongan feodal⁶.

Peranan buruh dalam politik ketika itu, dilatari oleh masuknya ajaran Marx-Lenin ke Cina. Kaum proletar atau buruh bergabung membentuk perkumpulan politik karena adanya sentralisasi industri, misalnya saja sentralisasi industri di daerah pesisir Shanghai. Selain itu, kesadaran politik yang mulai timbul setelah revolusi 1911 juga melatari ketelibatan buruh dalam gerakan politik. Kesadaran itu timbul setelah banyak terjadi penyimpangan kekuasaan dalam pemerintah dinasti Qing (清). Qing dianggap lemah karena membiarkan

⁵ Chow Tse-Tsung, *The May 4th Movement Intellectual Revolution in Modern China*, (Cambridge, Massachutes, and London, 1980), hal. 8.

⁶*Ibid.*, hal. 145-168.

daerah-daerah di Cina terpecah dalam konsesi-konsesi yang dikuasai oleh bangsa asing seperti Inggris, Prancis, dan Jepang.

Setelah Gerakan Empat Mei, keterlibatan buruh semakin besar dalam bidang politik. Buruh melalui perkumpulannya mulai berkembang menjadi organisasi politik. Pada tanggal 1 Juli 1921, terbentuklah Partai Komunis Cina (selanjutnya disebut dengan PKC). Pembentukan PKC di bawah pengawasan Komintern atau Komunis Internasional (*Gongchan Guoji* 共产国际). Komintern mengutus agennya yaitu Voitinsky untuk membimbing pendirian PKC. Sebelum kedatangan Voitinsky, Cina sudah kondusif untuk membentuk sebuah partai komunis. Hal itu karena para pelopor Marxisme-Leninisme, Li Dazhao (李大钊) dan Chen Duxiu (陈独秀) yang membawa masuk ajaran tersebut ke Cina. Bersama kaum intelektual Cina lainnya melakukan kegiatan-kegiatan politik untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Cina. Misalnya saja Chen Duxiu, setelah kembali dari Jepang tahun 1915, ia mendirikan majalah Pemuda Baru (*Xin Qingnian* 新青年). Sedangkan Li Dazhao, setelah kembali dari Jepang tahun 1916, ia menjadi editor di salah satu surat kabar Cina dan pada tahun 1918 menjabat sebagai kepala perpustakaan Universitas Beijing.

Keberadaan PKC semakin menguat setelah mengambil alih pemerintahan dari Partai Nasionalis Cina. Pada tanggal 1 Oktober 1949, PKC menjadi partai tunggal yang berkuasa di Cina. Pada saat itu juga, berdirilah Republik Rakyat Cina (*Zhonghua Renmin Gongheguo* 中华人民共和国). Dalam menjalankan pemerintahannya, PKC mengambil model “negara organis tenaga kerja”.

Model “negara organis tenaga kerja” ialah suatu model negara yang dipandang sebagai sebuah pabrik raksasa. Model semacam itu diselenggarakan menurut sebuah rencana dibawah pimpinan seorang manajer. Dengan kata lain negara diibaratkan sebagai pabrik, pemerintah sebagai manajer, dan warganegara sebagai tenaga kerja atau buruh yang bekerja secara terencana dan teratur atas

perintah atasannya (manajer). Ada sepuluh ciri “negara organis tenaga kerja”⁷, yaitu:

1. Negara memiliki monopoli eksklusif untuk menyusun rencana pembangunan ekonomi.
2. Negara menguasai kepemilikan (*ownership*) dan sekaligus kendali (*control*) atas kekuatan produksi.
3. Negara menggabungkan dan menyamakan tujuan negara dan masyarakat.
4. Negara menjadi satu-satunya agensi yang menentukan ukuran tenaga kerja dan norma-norma masyarakat.
5. Lama-sebentar intensitas tenaga kerja merupakan prinsip keadilan distributif.
6. Negara memberikan pekerjaan, promosi dan pensiun sedemikian rupa sehingga mayoritas penduduk bergantung pada negara.
7. Warganegara memiliki hak sesuai dengan kontribusi masing-masing bagi sistem produksi.
8. Hanya ada satu partai politik tempat mengungkapkan kepentingan sosial, dan partai ini sekaligus juga merupakan kendaraan untuk menyalurkan gagasan-gagasan sosialis, menjadi kekuatan inspirasi dari masyarakat, membuat perencanaan ekonomi dan menggalang rakyat untuk mematuhi peraturan dari negara.
9. Pemilihan umum ada tetapi merupakan ritus untuk menggalang persatuan masyarakat, partai, dan negara juga untuk mengiklankan rencana produksi, serta untuk menggairahkan masyarakat agar memenuhi semua itu.
10. Sistem produksi sosialis bersifat amat kompleks dan ekstensif, sehingga menyedot banyak orang ke dalam partai maupun aparat negara yang berlapis-lapis dan bertingkat-tingkat.

⁷ Neil Harding (ed.), *The State in Socialist Society*, (London, 1984), hal. 28. Dikutip oleh I. Wibowo, *Negara....*, hal. 91-92.

Pelaksanaan negara dengan model yang telah disebutkan sebelumnya dilakukan di bawah kekuasaan pemerintahan Mao Zedong. Pada masa itu, buruh ditempatkan dalam posisi istimewa. Buruh adalah tuan di negerinya sendiri⁸. Mereka mendapatkan beragam fasilitas atau tunjangan hidup dari pemerintah untuk diri dan keluarganya seperti jaminan kesehatan, pendidikan, makanan (gandum, daging babi, tahu, minyak), dan alat kebutuhan sehari-hari (jam tangan, kertas toilet, sabun). Selain itu, buruh yang bekerja pada unit kerja-unit kerja negara tidak bisa dipecat atau diberhentikan oleh manajer perusahaan⁹. Tak mengherankan jika menjadi seorang buruh pada masa itu begitu membanggakan dan diidam-idamkan.

Pada perkembangan buruh selanjutnya setelah tahun 1978, di masa pemerintahan Deng Xiaoping terjadi perubahan status buruh. Setelah Reformasi Ekonomi dan pembubaran komune di pedesaan dan unit kerja di perkotaan, berprofesi sebagai buruh bukanlah hal yang membanggakan. Penarikan sejumlah fasilitas istimewa yang dahulu diberikan oleh pemerintah Cina dan pemecatan sebagian buruh sebagai dampak dari restrukturisasi dan privatisasi perusahaan negara di desa dan kota, mampu menggoyang kestabilan status buruh. Bagi buruh yang masih bekerja di perusahaan negara bisa bernapas lega, tetapi bagi mereka yang dipecat dan bekerja di perusahaan-perusahaan swasta terkatung-katung dengan ketidakjelasan masa depan diri dan keluarganya. Hal itu disebabkan karena sudah hilangnya jaminan bekerja seumur hidup di perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka bekerja berdasarkan kontrak kerja yang bisa merugikan mereka sewaktu-waktu. Intinya, buruh di masa Deng sudah tidak menjadi tuan tetapi menjadi budak di negerinya sendiri.

⁸ I. Wibowo, *Belajar...*, hal. 13.

⁹ *Ibid.*, hal. 190.

II. 3. Buruh Migran Cina

II. 3. 1. Asal dan Status Buruh Migran Cina

Para petani atau penduduk desa Cina dengan status *hukou* pertanian yang bermigrasi ke daerah di luar daerah tempat tinggalnya untuk bekerja sebagai buruh dan menetap di sana dalam jangka waktu tertentu (enam bulan, satu atau tiga tahun) disebut buruh migran. Biasanya waktu mereka melakukan migrasi ialah saat musim tanam. Mereka sengaja datang ke kota atau daerah industri untuk mengisi kekosongan waktu mereka selama musim tersebut. Buruh migran semacam ini disebut sebagai buruh musiman atau buruh migran sementara.

Keberadaan para buruh migran itu diakui oleh pemerintah Cina. Kementerian Buruh dan Keamanan Sosial Cina membagi tiga kelompok sosial di Cina berdasarkan rendahnya pendapatan dan jumlah populasi inkompeten yang dalam perkembangan selanjutnya dibatasi oleh berbagai macam kondisi sosial¹⁰. Kategori pertama ditempati oleh para pekerja yang diberhentikan dari perusahaan milik negara karena bangkrut atau adanya pembaruan di tubuh perusahaan tersebut. Beberapa dari mereka mendapatkan dana pensiun bulanan dari pemerintah setempat. Kategori kedua yaitu mereka yang tidak pernah bekerja di perusahaan milik negara. Mereka adalah para wirausahawan skala kecil yang membangun usaha di tempat mereka tinggal. Kategori terakhir adalah para pekerja atau buruh migran yang bermigrasi dari pedalaman ke perkotaan.

Kebanyakan buruh migran bekerja sebagai buruh lepas (*mangliu* 盲流). Dalam perkembangan selanjutnya mereka bekerja sebagai buruh di perusahaan-perusahaan milik pribadi atau swasta. Daerah di Cina yang berpotensi besar sebagai daerah asal para buruh migran ialah provinsi-provinsi di bagian barat dan tengah Cina. Daerah-daerah tersebut seperti Sichuan (四川), Anhui (安徽), Henan (河南), dan Gansu (甘肃)¹¹.

¹⁰ Afanger, *The Status of "Socially Vulnerable Groups" in China*, http://www.marxist.com/Asia/vulnerable_groups_china.html, diakses tanggal 14 Maret 2008.

¹¹ Huang Ping & Frank N. Pieke, 2003. Dikutip oleh Zhan Shaohua, *Rural labour Migration in China: Challenges for Policies*, <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001402/140242e.pdf>, hal. 15, diakses dari tanggal 12 Februari 2008.

Buruh migran di Cina sebagian besar ialah pemuda usia produktif. Tujuh puluh persen buruh migran berusia antara enam belas sampai tiga puluh lima tahun. Pendidikan mereka sekurang-kurangnya sekolah dasar. Partisipasi mereka sebagian besar pada sektor industri yang sedang berkembang seperti konstruksi, komersial, makanan, dan sanitasi¹².

Keberadaan para buruh migran terkonsentrasi di sekitar perkotaan, seperti di pusat kota, daerah-daerah pinggiran di dalam dan luar kota. Mereka tinggal di asrama yang disediakan oleh pabrik atau menyewa sebuah tempat tinggal yang tidak jauh dari tempat mereka bekerja.

Pendapatan mereka setiap bulannya berkisar 300 yuan sampai 1.000 yuan lebih¹³. Besar pendapatan mereka itu tergantung di daerah Cina bagian mana mereka bekerja. Jika di daerah timur atau pesisir Cina, gaji mereka sekitar 1.000 yuan. Hal itu terjadi karena perkembangan ekonomi di setiap daerah di Cina berbeda-beda. Sebagai contoh daerah di Shenzhen (深圳) propinsi Guangdong (广东), pendapatan yang diterima para pekerja setiap bulannya sebesar 800 yuan¹⁴. Berikut adalah pernyataan salah seorang manajer perusahaan di propinsi Guangdong:

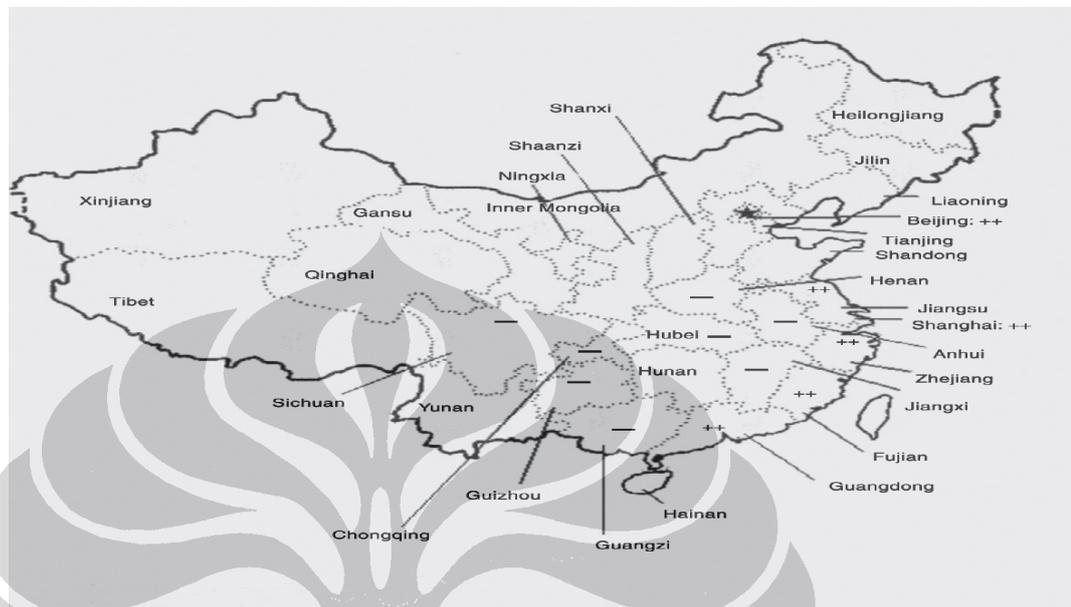
“Gaji untuk setiap pekerja sebesar 800 yuan setiap bulan...Jika mereka [para pekerja] menginginkan untuk mendapatkan uang lebih banyak, mereka harus bekerja melebihi waktu normal bekerja sekitar tiga atau empat jam. Kelebihan waktu [bekerja] dibayar dua kali lipat dari yang biasa dibayarkan...” (Wang Chunguang, 2005).

¹²Sebagai contoh di kota Shanghai (lihat lampiran 3). Shi Lu, *China Economic Review*, Vol. 13, isu 2-3, hal. 313-328 diterjemahkan oleh Jonathan Hall dlm. *Migrant Workers in Shanghai*, <http://chinaperspectives.revues.org>, 29 November 2006.

¹³Zhan Shaohua, *Rural...*, hal. 14.

¹⁴Wang Chunguang, *The Changing Situation of Migrant Labor (III Social Groups)*, (2006), http://goliath.ecnext.com/coms2/browse_R_S084, diakses tanggal 6 Februari 2008.

Gambar II. 1. Persebaran Daerah Asal dan Daerah Tujuan Buruh Migran Cina



Keterangan: ++ Daerah utama penerima buruh migran
-- Daerah utama pemasok buruh migran

Selain perbedaan wilayah di mana para buruh migran bekerja, hal lainnya yang berpengaruh pada besar dan kecilnya pendapatan yang mereka terima yaitu status mereka di perkotaan. Telah disinggung sebelumnya, bahwa status para buruh migran itu adalah *hukou* pertanian. Segala keperluan atau subsidi bagi mereka yang berstatus *hukou* pertanian dialokasikan di desa tempat mereka tinggal.

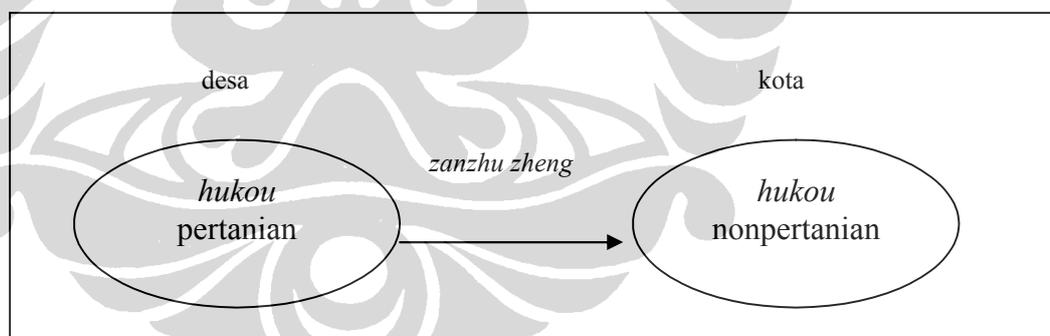
Ketika mereka bermigrasi ke kota, otomatis alokasi tersebut tidak tersedia di perkotaan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hak yang sama seperti di perkotaan, mereka harus meminta izin dan mendaftarkan diri selambat-lambatnya tiga hari setelah kepindahan mereka kepada pemerintah lokal setempat untuk membuat surat izin tinggal sementara tersebut. Surat izin itu berbentuk sertifikat dan dikenal dengan sebutan Sertifikat Izin Tinggal Sementara (*zanzhu zheng* 暂住证).

Tabel II. 1. Upah per Bulan Berbagai Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi (ETDZ) dalam Yuan

Atas	Pekerja Biasa	Manajer Menengah dan
Xining	500-700	1.200-2.000
Huhhot	500	-
Shihezi	750	1.200/1.500
Nanning	1.000	1.200-6.000
Changsa	400-600	1.000-2.000
Hefei	500	1.000-2.000
Urumqi	500-700	800-2.000
Yiaoshan	600-800	1.200-3.000
Huizhou Dayawan	800-1.000	1.500-8.000
Wuhu	500	1.000-4.000
Chongqing	800-1.000	1.500-5.000
Wuhan	400-600	1.000-1.200

Sumber: Simon Saragih, "Pelayanan Infrastruktur dan Pekerja China Sangat Istimewa" dlm. *Cermin Dari China*, Bagus Dharmawan (ed.), (Jakarta, 2006), hal.17.

Bagan II. 1. Perpindahan *Hukou* Sementara



Sertifikat Izin Tinggal Sementara adalah paspor untuk tinggal di daerah kota. Paspor tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus hal-hal yang bersifat formal, seperti mengajukan surat izin mengemudi kendaraan dan menyewa sebuah tempat tinggal. Biaya untuk mengurus sebuah sertifikat sebesar satu sampai lima yuan dan masa berlakunya maksimal selama satu tahun. Sertifikat tersebut harus selalu diperbaharui setiap enam sampai dua belas bulan. Jika tidak, mereka akan

kesulitan memperoleh akses layanan sosial yang terdapat di kota tempat mereka tinggal, misalnya saja akses pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan pekerjaan.

Para buruh migran yang tidak terdaftar atau yang tidak memiliki izin tinggal sementara disebut sebagai populasi mengambang (*liudong renkou* 流动人口). Jumlah mereka sulit dideteksi. Akan tetapi diperkirakan di dalam sebuah kota besar di Shanghai, jumlah mereka sekitar dua sampai tiga ratus ribu. Karena status mereka tidak jelas, maka mereka sulit untuk mendapatkan akses layanan sosial yang terdapat di kota tempat mereka tinggal. Untuk akses tempat tinggal misalnya, mereka tinggal di kediaman keluarga atau secara berkelompok¹⁵, hotel-hotel atau losmen-losmen, kapal-kapal, pasar-pasar, jalan kereta api, dan stasiun-stasiun bus.

Kesulitan akses layanan sosial lainnya yang dihadapi oleh populasi mengambang yaitu kesulitan memperoleh akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Tidak selalu buruh migran yang bermigrasi itu seorang diri. Mereka yang telah menikah terkadang membawa serta anak dan pasangannya untuk bermigrasi. Anak-anak mereka statusnya tak jauh dari orangtuanya, tidak terdaftar dan tidak memiliki izin tinggal sementara. Sehingga akses pendidikan anak-anak tersebut tertutup. Seandainya pun orangtua mereka tetap ingin menyekolahkan mereka di sekolah, mereka dikenakan biaya pendidikan yang tinggi. Sebagai contoh, di Beijing (北京) anak-anak dari para buruh migran harus membayar biaya pendidikan tiga atau lima kali lebih tinggi dari penduduk kota. Rata-rata biaya pendidikan di tempat tersebut sekitar 400 yuan. Itu berarti, anak-anak dari para buruh migran itu harus membayar biaya pendidikan sebesar 1.200-2.000 yuan. Oleh karena itu, mereka kemudian mencari alternatif lain untuk bisa mendapatkan akses pendidikan.

Jalan yang ditempuh untuk mendapatkan pendidikan bagi anak-anak para buruh migran ini adalah dengan membangun sekolah-sekolah informal. Pada

¹⁵ Buruh migran yang bermigrasi, bekerja dan menetap di perkotaan bersama keluarga atau sekelompok orang dari desa atau klan yang sama. Mereka membentuk sebuah organisasi migran yang solid. Fungsi organisasi ini sebagai media yang memayungi para migran, baik mereka pendatang lama maupun baru. Di dalam organisasi ini, mereka saling bantu dan melindungi dari “asing, keras, dan kejam”nya kota. Lihat Hein Mallee, *Chinese...*, hal. 97-99.

tahun 2000, jumlah sekolah semacam itu ada 123 sekolah dengan 16.492 murid¹⁶. Masalah kualitas pendidikan sekolah informal tersebut tentunya jauh berbeda jika dibandingkan dengan kualitas pendidikan penduduk kota yang status *hukou*-nya nonpertanian. Karena mulai dari perlengkapan kelas, buku-buku pelajaran, sampai sumber daya pengajarnya terbatas. Para pengajar kebanyakan buruh migran itu sendiri yang tidak memiliki pendidikan resmi dalam bidang pengajaran.

Kesulitan akses layanan sosial akibat tidak terdaftarnya para buruh migran dan tidak memiliki izin tinggal sementara mengakibatkan posisi atau keberadaan mereka lemah. Buruh-buruh migran ilegal inilah yang sering dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh para manajer atau pemilik perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Ketiadaan izin tinggal yang resmi menyebabkan masalah yang serius dalam kontrak kerja mereka. Misalnya saja tidak adanya jaminan keselamatan kerja dan kesehatan.

Profesi awal sebagian besar para buruh migran Cina adalah petani. Kedatangan mereka ke kota untuk bekerja tanpa disertai keahlian khusus. Mereka yang statusnya ilegal juga tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Sehingga ketika bekerja dan mengalami kecelakaan saat bertugas, mereka akan sulit mendapatkan kompensasi untuk kecelakaan tersebut. Kalau pun berhasil mendapatkannya, besar dari kompensasi tersebut akan berbeda dari penduduk kota yang status *hukou*-nya nonpertanian. Untuk penduduk kota dengan status *hukou* nonpertanian akan mendapat kompensasi akibat kecelakaan kerja sebesar 40.000 yuan, sedangkan untuk buruh migran sebesar 30.000 yuan¹⁷. Perbedaan ini karena status buruh migran yang sifatnya sementara (tinggal kurang dari 1 tahun). Selain kasus tersebut, masih ada kasus-kasus lainnya yang menimpa buruh migran, misalnya penundaan pemberian gaji, waktu bekerja yang berlebihan (lebih dari 8 jam), dan pemecatan sepihak oleh manajer¹⁸.

¹⁶ Afanger, *The Status...*

¹⁷ Han Dongang, *Migrant Workers Start to Win Significant Compensation Awards in The Courts*, www.webmaster.shs.com.

¹⁸ Chen Guidi dan Wu Chuntao, *China Undercover: "Rahasia" di Balik Kemajuan China*, (Jakarta, 2007), hal. 320-321. Lihat juga, Carl Goldstein, "Searching For Jobs" dlm. *China in Transition*, Frank Ching (ed.), (Hongkong, 1994), hal. 117-120.

“...Sebagaimana terlihat dalam sejumlah ketidakadilan yang mereka alami: mereka bekerja lembur tanpa bayaran ekstra; mereka menjalani kondisi-kondisi bekerja yang berbahaya tanpa perlindungan; kadang-kadang pembayaran mereka ditunda....” (Chen Guidi dan Wu Chuntao, 2007)

II. 3. 2. Kaitan Antara Pentingnya Pendidikan dan Peningkatan Pendapatan

Angin perubahan yang dihembuskan sejak Reformasi Ekonomi 1978 memberikan dampak terhadap buruh migran. Sistem pasar-sosialis mampu mempengaruhi nilai dan pemikiran para buruh migran, khususnya dalam memenuhi tujuan-tujuan hidupnya.

Para petani dan penduduk desa beramai-ramai bermigrasi. Mereka bekerja di kota menjadi buruh. Gaji atau pendapatan yang mereka terima, lebih suka mereka manfaatkan untuk ditabung atau mengirimkannya kepada keluarga mereka di desa. Berdasarkan data tahun 2001 Kementerian Buruh dan Keamanan Sosial di Cina, pada tahun 2000 rata-rata setiap migran mengirimkan uang sebesar 4.522,15 yuan kepada keluarganya di desa. Uang kiriman tersebut selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan), juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder (pendidikan) bahkan tersier (pembangunan rumah yang lebih besar).

Tak bisa dipungkiri, di negara mana pun di dalam era modern dan global saat ini pendidikan menjadi hal yang sangat penting. Umumnya, semakin tinggi tingkat dan kualitas pendidikan seseorang maka semakin baik pula tingkat kehidupannya. Menurut teori *human capital*, seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap menambah satu tahun sekolah sama dengan meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang¹⁹. Oleh karena itu, jelaslah bahwa dengan pendidikan seseorang dapat mengembangkan sumber daya yang dimilikinya. Pengembangan sumber daya tersebut akan memacu peningkatan produktivitas seseorang dalam pekerjaannya.

¹⁹ Priyono, M. Yasin, dan Djunaedi Hadisumanto, *Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja, dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta, 1982), hal. 11.

Sistem pengupahan atau gaji, baik dalam skala nasional maupun skala internasional pada dasarnya mengandung tiga prinsip. Ketiga prinsip itu adalah pemberian imbalan atas nilai pekerjaan, penyediaan insentif, dan jaminan kebutuhan hidup buruh. Di negara-negara maju sistem pengupahan biasanya dipandang hanya sebagai suatu patokan pemberian imbalan yang sesuai terhadap nilai kerja atau jasa yang diberikan oleh seseorang. Dengan kata lain, seorang pekerja atau buruh akan menerima upah atau gaji sebesar nilai kerja yang diberikannya. Hal semacam ini dikenal dengan istilah nilai tambah produksi marjinal buruh. Semakin tinggi tingkat produktivitas buruh maka semakin tinggi pendapatan yang akan diterimanya. Sebaliknya, jika produktivitas rendah maka pendapatan yang diterimanya pun semakin rendah²⁰.

Para penduduk desa di Cina, sedikit banyak telah menyadari pentingnya pendidikan. Kompetisi atau persaingan mendapatkan pekerjaan dalam sistem pasar-sosialis tak bisa dihindari. Para buruh migran dan nonmigran masing-masing bersaing dalam pasar tenaga kerja di Cina. Mereka memperebutkan pekerjaan dengan gaji yang cukup menjanjikan bagi mereka. Akibatnya, untuk mencapai tujuan tersebut pendidikan menjadi salah satu investasi mereka di masa depan. Contoh yang nyata ada di kabupaten Wanzai (万载) yang terletak di daerah administratif Yichun (宜春), Jiangxi (江西). Penduduk di kabupaten Wanzai sangat menekankan pendidikan anak-anaknya. Bahkan mereka berani berinvestasi dengan jumlah dana yang besar menurut ukuran mereka dalam bidang ini²¹.

Awalnya para orang tua di kabupaten Wanzai keberatan memasukkan anak mereka ke sekolah. Bagi mereka pendidikan di desa sangat mahal, yaitu sekitar 500 yuan untuk sekolah dasar dan 1.200 yuan untuk sekolah menengah²². Oleh karena itu para orangtua penduduk desa segan memasukkan anak-anaknya ke sekolah untuk belajar. Bagi orangtua yang menyekolahkan anak-anaknya, mereka pun lebih memilih untuk menyekolahkan anak lelaki mereka

²⁰ *Ibid.*, hal. 22-23.

²¹ Rachel Murphy, "Migration, Remittances, and Goals" dlm *How Migrant Labor is Changing Rural China*, (Cambridge, 2002), hal. 100.

²² *Ibid.*, hal. 93.

dibandingkan anak perempuan mereka. Alasannya karena anak perempuan akan merugikan mereka. Setelah dewasa dan mengenyam pendidikan, anak perempuan akan menikah dan hidup dengan keluarga dan orangtua yang lain²³.

Akan tetapi seiring angin perubahan zaman dan sistem pasar yang semakin berhembus keras. Mau tidak mau pemikiran para orangtua penduduk desa Wanzai berubah. Mereka tidak membedakan lagi anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan sekolah. Kebutuhan akan kehidupan yang demikian tinggi dan kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai modal mendapatkan pekerjaan di perkotaan telah memacu mereka untuk menginvestasikan uang mereka untuk hal tersebut.

Tabel II. 2. Laporan Level Pendidikan Individu dari 138 Keluarga dengan Status Migrasi di Desa Wanzai, Daerah Administratif Yichun, Jiangxi

Level Pendidikan	Migran	Nonmigran
Sekolah Menengah Umum	±15%	±5%
Sekolah Menengah Pertama	±40%	±30%
Sekolah Dasar	±40%	±45%
Tidak Berpendidikan	< 5%	>15%

Sumber: Diolah dari survei sensus tahun 1996 dan survei Rachel Murphy tahun 1997, *How Migrant Labor is Changing Rural China*, (2002), hal. 98.

Anak-anak perempuan disekolahkan dengan alasan mereka juga memiliki peluang yang sama besarnya dengan anak laki-laki. Jika sebelumnya menyekolahkan anak lelaki sebagai modal mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang sehingga menguntungkan orangtua mereka. Orangtua mereka tidak perlu khawatir dengan keadaan anak laki-laki mereka setelah menikah. Karena mereka akan membawa serta isteri dan anak-anaknya tinggal bersama orangtua mereka. Seperti telah dijelaskan sebelumnya apa yang menjadi alasan orangtua mereka menomorduakan anak perempuan untuk bersekolah, sekarang kondisinya berbeda. Memang setelah menikah anak-anak perempuan itu akan hidup dan tinggal

²³ *Ibid*, hal. 92-93.

dengan keluarga lain, yaitu keluarga suaminya. Akan tetapi, anak-anak perempuan mereka, tentunya memiliki keterkaitan erat untuk membalas budi atau berbakti dengan orangtuanya. Sehingga keuntungan memiliki anak laki-laki dan perempuan yang mengenyam pendidikan akan sama.

